

Daftar Pustaka

Buku

- Dwiyanto, Agus, *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, 2014, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasejo, Eko, dkk, *Mengurai Benang Kusut Birokrasi, Upaya Memperbaiki Centang-Perenang Rekrutmen PNS*, 2006, Depok, Piramedia
- Terry, George R, *Principles Of Management*, 1986, Bandung: PT. Alumni
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, 2011, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 2002, Yogyakarta; Andi Offset.
- Toha, Miftah *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, 2012, Jakarta; Rajawali Pers.
- Muslim, Kasim, *Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah, Mewujudkan Good Governance di Ranah Minang*, 2012, Padang; Pemprov Subar dan Meifa Media Publishing.
- huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2007, Yogyakarta; FH UII PRESS.
- Ratminto, Winarsih, Atik, Septi, *Managemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, 2005, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Steers, Richard, M, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*, 1985, Jakarta; Eirlangga.
- Indradi, Sjamisjar, S. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*, 2017, Malang; Intrans Publishing.
- Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 1992, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Siagian, Sondang P, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, 1992, Jakarta: Bumi Aksara.

Buku Metode

Afifuddin, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2009, Bandung; Pustaka Setia.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, 2014, Jakarta; PT. Gravindo Persada.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2005, Jakarta; Pt. Raja Grafindo.

Faisal, Sanapiah, *Peenelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, 1990, Malang.

Sugiono, *Memahami Metode Penelitian kualitatif*, 2005, Bandung; Penerbit Alfabet.

Peraturan Perundang-Undangan

PP Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor. 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten dharmasraya.

Surat Keputusan (SK) Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/273/KPTS-BUP/2009 tentang pembentukan dan peresmian Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan (TPP) dalam pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintahan KABUPATEN Dharmasraya.

Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 189.1/251/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pdf

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN).Pdf

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Laporan Penelitian

Syaiful, Heru, P. Putra. 2016. "Peran Stakeholder Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pakta Integritas (PI) Aparatur Pemerintahan Daerah Berbasis

Informal Institutions”.*Laporan Penelitian* tidak untuk diterbitkan.Padang. universitas Andalas.

Skripsi

Sonya Verinasari. 2017.“Pelaksanaan Pakta Integritas Di Kabupaten Dharmasraya”. *Skripsi* tidak untuk diterbitkan. Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

Jurnal

Suhartono.Penyimpangan Anggaran dan Indeks Persepsi Korupsi.*Jurnal Info Singkat*, 2014, Volume 6, No. 23 diakses di berkas.dpr.go.id

Darwanis dan Sephi Chairunnisa, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, vol. 6 No. 2 Juli 2013

Modul

Transparency Internasional,he Integrity Pact, The Concept, the model and the Present Applications: A Status Report, 2002, Berlin.

modul sosialisasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah “*Akuntabilitas dan Good Governance*”,2000,Jakarta; lembaga Administrasi Negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1380e9ca639/pakta-integritas-antikorupsi-masih-sebatas-formalitas> tanggal 10 Agustus 2017, pukul 14.20 Wib

www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/01/modul-strategi-mendorong-pakta-integritasdiaksestanggal11 Agustus 2017 pukul 01:05 wib

www.transparency.org/building_coaltions/integrity_pact/index.htmlpada Tanggal 17 juli 2017, pukul 13. 47 Wib

<https://eriprima.wordpress.com/2012/07/07/pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-inspektorat-kabupaten-terhadap-badan-kepegawaian-daerah/> tanggal 17 juli 2017, pukul 13. 38 Wib

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-preceptions-index-2016>, tanggal 17 juli 2017, pukul 13.04 Wib

<http://m.antaranews.com/berita/271228/terdakwa-kasus-mobil-damkar-kabupaten-dharmasraya-minta-bebas-pada> tanggal 17 juli 2017, pukul 14.15 Wib

Diakses dari <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 21.30 wib

